
PROFIL ORGANISASI WANITA PERSATUAN UMMAT ISLAM (WANITA PUI) TAHUN 2000AN

Erni Isnaeniah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: erniisna@gmail.com

Abstrak

Kehadiran gerakan organisasi perempuan Islam Indonesia di pentas nasional sudah tidak diragukan lagi, termasuk Wanita Persatuan Umat Islam (Wanita PUI) yang merupakan organisasi perempuan Islam Indonesia hasil “Fusi” antara “Fathimiyyah” dengan “Zaenabiyyah” yang telah menjadi badan otonom PUI (Persatuan Umat Islam). Apabila dibandingkan dengan organisasi perempuan Islam Indonesia lainnya, seperti Aisiyah, Persistri, Muslimat NU, Wanita PUI kurang memiliki sikap progresif dalam mengantisipasi kemajuan serta transformasi perubahan sosial yang berada di masyarakat sekitarnya sehingga program-program yang digagas oleh Wanita PUI kurang mendapat respon. Wanita PUI Jawa Barat memasuki abad ke 21 tepatnya periode kepengurusan tahun 2016-2021 mengalami perubahan yang lebih baik, yaitu susunan kepengurusan yang didominasi oleh kader Wanita PUI dengan level pendidikan rata-rata S1 dan program kerja yang terlihat lebih terarah, sehingga saat ini mulai mendapat apresiasi dari kalangan perempuan Islam di Jawa Barat.

Kata kunci: *gerakan, organisasi perempuan Islam, Wanita PUI Tahun 2000an*

Abstract

The presence of Indonesian Islamic Women's Organization Movement in national stage had no doubt, also Wanita Persatuan Umat Islam (Wanita PUI) which is Indonesian Islamic Women's Organization as an output of “Fusi” between “Fathimiyyah” and “Zaenabiyyah” which had be autonomous body of PUI (Persatuan Umat Islam). If compared with others Indonesian Islamic Women's Organization such as Aisiyah, Persistri, Muslimat NU, Wanita PUI have less progressive movement in anticipate the progress and social change's transformation in the society until the programs initiated by Wanita PUI get less respon. Wanita PUI Jawa Barat in 21st Century exactly in management periode in 2016-2021 encounter the transformation better, which dominated by Wanita PUI cadre which are bachelors degree level and the program more directed, so that at the moment started get appreciation among Islamic women in West Java.

Keyword: *movement; Islamic Women's Organization, Wanita PUI in year 2000*

A. PENDAHULUAN

Menurut penelitian *Shiraisi* dalam Rahayu (1996), masa perempuan bergerak di Nusantara kini disebut Indonesia diawali oleh sosok perempuan keturunan bangsawan yang bernama Kartini, sampai terbangunnya sekaligus lahir dan munculnya gerakan organisasi perempuan di Indonesia khususnya gerakan organisasi perempuan Islam sejak tahun 1912. Manuver pergerakan yang digagas oleh kaum perempuan Indonesia khususnya perempuan Islam sesungguhnya memiliki kesamaan dalam dasar, model dan corak perjuangan yang di-

bangun oleh kaum laki-laki Indonesia khususnya laki-laki muslim. Terbangunnya gerakan organisasi laki-laki dan perempuan Islam pada dasarnya melambangkan munculnya kesadaran politik baru sebagai bagian dari bangsa terjajah kemudian berusaha untuk meng-hancurkan berbagai bentuk penjajahan di bumi nusantara untuk selanjutnya disebut Indonesia.

Gerakan perempuan pertama yang terbentuk pada masa kekuasaan Belanda di Indonesia menurut Deliar Noer (1994), adalah “POETRI MARDHIKA” atas prakarsa gerakan kaum laki-laki dari kubu nasionalis

“BOEDI OETOMO”, gerakan perempuan ini diketuai oleh RA. Theresia Sabaroeddin, memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memajukan pendidikan bagi kaum perempuan pribumi, sekaligus berikhtiar membuka kesempatan bagi perempuan pribumi Indonesia berpartisipasi di wilayah publik (di luar rumah/domestik, serta mampu menyatakan pendapatnya dihadapan masyarakat serta berupaya menyetarakan kedudukan bersama kaum laki-laki.

Akhirnya, muncullah gerakan organisasi perempuan Islam yang diawali oleh gagasan perempuan kader Muhammadiyah organisasi laki-laki Islam, secara pemikiran sederhana dibentuknya wadah bagi perempuan untuk lebih leluasa dalam mengaktualisasikan gagasan-gagasannya dalam berbagai peranan, maka lahir Aisyiyah pada tahun 1917 sebagai badan independen/mandiri bagian dari organisasi organisasi pembaharuan laki-laki Muslim Muhammadiyah, diikuti oleh badan otonom dari PUI (Persatuan Umat Islam) sebelumnya bernama Persyarikatan Ulama yang bernama Fathimiyyah dibentuk pada tahun 1930 kemudian berubah nama menjadi Wanita Persatuan Umat Islam (Wanita PUI) merupakan organisasi perempuan hasil fusi (gabungan/digabung dengan organisasi perempuan PUII bernama Zaenabiyyah), selanjutnya Persistri (Persatuan Islam Istri) bagian dari Persis (Persatuan Islam) berdiri pada tahun 1936, dan kemudian Muslimat bagian dari NU (Nahdlatul Ulama),

Keberadaan gerakan organisasi-organisasi perempuan Islam Indonesia ini dari semenjak kelahirannya hingga saat ini bisa jadi tidak diragukan lagi. Seperti yang disampaikan oleh Hafidz (1993; 135) melalui berbagai kontribusinya kepada masyarakat melalui program-program yang berkesinambungan sudah dilaksanakan dari sebelum Indonesia merdeka saat itu masih disebut nusantara, orga-

nisasi perempuan Islam ini telah banyak melakukan sekaligus berdarma bakti bagi perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat disekitarnya. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri tentunya organisasi perempuan Islam ini pernah mengalami keadaan timbul tenggelam dan masa-masa sulit dalam perjalanan, pertumbuhan, dan perkembangannya.

Apabila dibandingkan Aisyiyah, Persistri, ataupun Muslimat, Wanita PUI, diketahui sekaligus dirasakan masih mengalami kecenderungan kurang “greget” dan progresif bahkan dirasakan terlambat dalam mengantisipasi kemajuan-kemajuan dan perubahan-perubahan serta transformasi zaman yang berubah sangat luar biasa cepat terlebih berkenaan dengan partisipasi perempuan di wilayah publik dengan berbagai nuansa program-programnya serta memunculkan gagasan-gagasan dalam perjuangan menuju peningkatan kualitas. Kecenderungan Wanita PUI tersebut dapat dilihat dari kurangnya respon dari kalangan muslimah disekeliling keluarga besar PUI bahkan generasi mudanya.

Keadaan Wanita PUI dengan kondisi seperti itu, bukan berarti organisasi perempuan Islam Indonesia ini telah kehilangan semangat dalam perjuangannya, bisa jadi alasan yang paling tepat bagi Wanita PUI, adalah, Wanita PUI tengah berusaha mencari bentuk yang tepat dalam membangun misi dan visi perjuangannya. Terutama pada tahun 1995 setelah diadakannya Mukhtar PUI di Jakarta dimana Wanita PUI tidak lagi berkedudukan sebagai badan otonom akan tetapi hanya menjadi salah satu dari delapan majelis yang termasuk dalam kepengurusan PB. PUI. Posisi tersebut oleh para aktivis Wanita PUI dirasakan kurang leluasa untuk dapat mengaktualisasikan gagasan-gagasannya, dibandingkan pada tahun 70-an dimana Wanita PUI

mampu untuk mandiri menjadi sebuah badan otonom.

Dengan kenyataan seperti itu, bukan berarti Wanita PUI mengalami kemandegan dalam memperjuangkan gagasan-gagasannya. Karena dalam perjalanan kesejarahannya Wanita PUI pernah mengalami masa-masa dinamis dimana kinerja dan etos kerja seluruh anggota Wanita PUI mampu memberikan warna dalam menyemarakkan perjuangan gerakan organisasi-organisasi Wanita Islam yang ada di Indonesia. Masa dinamis yang dialami oleh Wanita Islam PUI terjadi sekitar tahun 1970-an, dimulai dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1980. Pada saat itu Wanita PUI dipimpin oleh tiga serangkai yaitu, ibu Hj. Muhafillah sebagai ketua, ibu Hj. Halimah Halim (putri dari K.H. Abdul Halim pendiri PUI) sebagai wakil ketua dan ibu Hj. Iva Ikhlasiah (cucu pendiri PUI) sebagai sekretaris jenderal. Tiga serangkai ini dianugrahi amanah untuk memimpin Wanita PUI selama dua periode dan berakhir pada tahun 1980. Pimpinan Pusat Wanita PUI ini berkedudukan di kota kelahiran gerakan organisasi PUI, Majalengka. Sebelum akhirnya dipindahkan ke Jakarta atas prakarsa Ketua Umum PB. PUI pada saat itu, K.H. Abdul Azis Halim yang merupakan putra pendiri PUI.

Memasuki dekade 90-an Wanita PUI dirasakan mulai kehilangan arah perjuangannya, bukan hanya disebabkan Wanita PUI tidak lagi menjadi sebuah badan otonom, akan tetapi adanya faktor lain yang juga turut menambah panjangnya penyebab kemandegan Wanita PUI, adalah, ada beberapa orang tokoh yang merupakan motor penggerak organisasi, sekaligus menjadi anggota legeslatif dari partai yang berlainan, aktivitas mereka sebagai anggota partai juga menuntut perhatian yang lebih sehingga memerlukan energi dan pemikiran yang tidak kalah besarnya dibanding dengan

aktivitas dan keberadaan mereka di dalam tubuh organisasi.

Meskipun demikian Wanita PUI tetap memiliki sikap konsisten dan kompeten terhadap jati diri dan berkembangnya organisasi. Salah satu contohnya adalah, sikap dan pandangan Wanita PUI terhadap dunia politik dimana Wanita PUI benar-benar memegang teguh terhadap kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh pengurus PB. PUI, yaitu bahwa Wanita PUI memiliki sikap senantiasa “ada di mana-mana dan tidak di mana-mana”. “Jargon” tersebut menggambarkan sikap independen dan bebas aktif-nya kiprah Wanita PUI di panggung politik. Sehingga ketika ada tokoh-tokoh Wanita PUI aktif di partai yang berbeda itu tidak dijadikan masalah. yang utama mereka tetap memperjuangkan eksistensi Wanita PUI di panggung politik bangsa. Karena pada dasarnya Wanita PUI bukanlah organisasi masa yang berorientasi kepada politik sebagaimana ketika PUI didirikan.

Pada dasarnya Wanita PUI tidak memiliki ciri khas sebagaimana gerakan organisasi Wanita lainnya, seperti Aisyiyah yang berorientasi dan mengadopsi nilai-nilai barat dalam memperjuangkan gagasannya di bidang pendidikan dan sosial, ataupun Persistri yang lebih kental dengan warna puritannya, begitu juga dengan Muslimat organisasi Wanita Islam yang berorientasi kepada kemadzabban. Bisa jadi disebabkan berwajah ganda-lah sebagai penyebab utama mengapa Wanita PUI tidak memiliki warna khas, sehingga mampu membuat Wanita PUI kehilangan konsentrasi dan belum memiliki nilai-nilai kharisma sebagaimana teman-teman seperjuangannya sesama gerakan organisasi Wanita Islam yang ada di Indonesia.

Disamping itu, belum terlihat bagaimana sesungguhnya profil dari Wanita PUI selama ini dengan berbagai program-program kerja yang dilaksanakannya dari awal kehadi-

rannya di Indonesia hingga tahun 2000an dengan segala dinamika partisipasinya di wilayah publik akan dapat memberikan gambaran yang kongkrit apakah system sosial di tubuh PUI sebagai organisasi induknya yang seolah lebih mengedankan “darah biru” dari lingkungan pendiri PUI yaitu kel. KH. Abdul Halim, antara lain tergambar dalam kehidupan berorganisasi PUI yang menempatkan keluarga pendiri (founding father) dalam posisi istimewa, juga dapat memberi corak pada organisasi Wanita PUI. Apabila demikian, maka partisipasi di wilayah publik yang telah dijalankan, kiranya “hanya” terbatas dikalangan “istimewa” Wanita PUI.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Lexy J. Meleong (2011; 5-6) dengan memiliki maksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh berbagai sumber sekaligus subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, termasuk juga hasil pemikiran-pemikiran yang mengejawantah dalam tindakan, secara holistik, melalui cara deskriptif analisis dalam uraian kata-kata serta bahasa yang tersusun, pada suatu konteks secara bersamaan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Bahkan menurut Wallace dan Wolf (1986; 233), apabila melihat karakteristik masalah penelitian seperti disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini wajib menggunakan metode kualitatif karena secara sosiologis dan antropologis fokus kajian terhadap peristiwa itu berangkat dari kesadaran dan pengalaman yang sangat pribadi dan berusaha untuk menolak asumsi-asumsi, prejudice dan dogma dengan filosofis tertentu. Sekaligus lebih menekankan pada segala sesuatu yang dapat ditangkap melalui alat indera dalam mencari jawab terhadap bagaimana sebuah peristiwa terjadi, khususnya peristiwa dimana gerakan organisasi perempuan Islam Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tahap dan kurun waktu tertentu penelitian ini akan mengungkap ketersambungan peristiwa saat ini ketika penelitian ini dilakukan dengan peristiwa masa lalu disaat keadaan sebenarnya yang telah terjadi sehingga dijadikan benang merah peristiwa yang akhirnya akan dianalisa secara ilmiah, yaitu secara kritis dan kronologis, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis (historical approach), seperti disampaikan oleh Gottschalk dalam Nina Herlina Lubis (2011; 2-7) adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, sehingga peristiwanya dapat dihadirkan kembali dengan cara membangun kejadian dari jejak-jejak yang disebut sumber (*historical sources*). Pendekatan historis ini digunakan untuk melihat bagaimana sesungguhnya realitas program perkembangan Wanita PUI dari awal kehadirannya hingga tahun 2000an di Indonesia, yang biasa dilakukan sekaligus menjadi sumber rujukan sehingga sampai kepada masyarakat perempuan Islam khususnya dan perempuan Indonesia secara luas untuk dapat dipahami dengan lebih mudah sekaligus mengantarkan masyarakat kearah perubahan yang lebih baik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangat menitikberatkan pada teknik-teknik sebagai berikut; (1) Observasi terlibat (participant observation) dilakukan terhadap bahan-bahan dokumenter dan literer, sebagai alat konfirmasi, observasi juga dilakukan terhadap kegiatan nyata Wanita PUI dalam menjalankan program-program kegiatannya. Dari setiap observasi yang dilakukan akan diamati dan dianalisis tentang makna-makna kultural dari setiap fenomena yang muncul melalui cara-cara mengkaitkan antara informasi dan konteks. Teknik observasi terlibat dipandang tepat digunakan dalam penelitian

ini sebab dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan fakta secara langsung dan dalam corak perilaku yang alamiah. (2) Teknik wawancara mendalam (indepht interview) terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti, selain itu lebih menekankan pada pendalaman informasi dari apa yang tampak dan mudah diobservasi. Metode ini memungkinkan karena adanya peluang untuk membatasi jumlah informan, tetapi dengan tetap memelihara objektifitas ilmiah. Bahkan jika ada kemungkinan munculnya sejumlah informan baru hal ini lebih didasarkan pada temuan baru sebagai akibat dari penggunaan pendekatan snowball sampling technique. (3) Kajian bahan tertulis, yaitu pustaka dan dokumentasi, dimaksud mengumpulkan data serta meneliti beberapa informasi dari dokumen-dokumen yang berisi rekaman-rekaman mengenai keadaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan Wanita PUI biasa bergiat. Disamping itu, tentu saja dilakukan studi kepustakaan untuk menelusuri kajian-kajian ilmiah yang relevan dan ini digunakan untuk melihat makna dan konteks ilmiah dari suatu realitas agar dapat dikaji atau dianalisis secara ilmiah pula.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu (1) sumber data primer, dan (2) sumber data sekunder. Karena titik berat pengumpulan data adalah observasi terlibat (participant observation) dan wawancara mendalam (indepht interview), maka sumber diambil secara purposive dengan pertimbangan-pertimbangan efisiensi kekayaan dan keakuratan data. Oleh sebab itu informasi yang diperlukan untuk kepentingan penelitian akan diperoleh melalui sekurang-kurangnya dua sumber, yaitu sumber-sumber dokumenter termasuk bahan kepustakaan dan sumber lapangan. Sumber dokumenter dan bahan kepustakaan terutama diperlukan untuk mengungkap fakta-fakta terdahulu (historis),

sedangkan lapangan merupakan sumber informasi mengenai fakta-fakta yang lalu hingga penelitian dilakukan masih berlangsung.

Meskipun demikian, kedua sumber itu bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi satu sama lain saling melengkapi. Disamping itu, sejumlah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek pokok yang sedang diteliti, juga menjadi bagian dari sumber informasi penting dan tidak terpisahkan. Adapun wawancara mendalam (indepht interview) dilaksanakan dengan sumber data dari lapangan, yaitu :

1. Jajaran pengurus Wanita PUI Jawa Barat
2. 5 (lima) orang tokoh dan pengurus PUI Jawa Barat
3. 10 (sepuluh) orang anggota dan kader Wanita PUI dan PUI Jawa Barat

Ada beberapa tahapan yang ditempuh dalam proses analisis data ini, adalah seperti, *Pertama*, pemrosesan data, yaitu mempelajari semua jenis data yang sudah terkumpul sesuai dengan tipe dan karakteristiknya, *Kedua*, kategorisasi, dalam tahapan ini peneliti membuat kriteria-kriteria masalah terlebih dahulu sebagai pedoman dalam tahap kategorisasi. Ketiga, penafsiran data, target dalam penafsiran data dalam penelitian ini diperolehnya deskripsi komprehensif mengenai perkembangan gerakan organisasi perempuan Islam di Indonesia Wanita PUI Jawa Barat. Penulisan laporan dalam penelitian ini mencakup hasil analisis peneliti setelah melaksanakan penelitian. Laporan dibuat dengan mengikuti pola ilmiah baku.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Melacak Sejarah Kelahiran Wanita PUI/Perjalanan Organisasi

Wanita Persatuan Umat Islam (Wanita PUI), menurut Wanta (1991; 34) lahir dari 2 (dua) organisasi Wanita, Fathimiyah, yaitu nama organisasi Wanita Persatuan Ummat

Islam di Majalengka dan Zaenabiyah, yaitu organisasi Wanita “Persatuan Ummat Islam Indonesia (Wanita PUII)” di Sukabumi. Keduanya berfusi menjadi Wanita Persatuan Ummat Islam (Wanita PUI), pada 5 April 1952 M bertepatan dengan 09 Rajab 1371 H di Bogor. Pada saat bersamaan dengan fusinya Persatuan Ummat Islam (PUI) dengan Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII), kemudian disepakati menjadi Persatuan Ummat Islam (PUI).

Sebagaimana juga PUI (Persatuan Ummat Islam) yang merupakan induk organisasi Wanita PUI. Wanita PUI tidak bisa dipisahkan dari alasan lahirnya PUI yang menurut Deliar Noer (1990), termasuk ke dalam organisasi “kaum reformis”, model gerakannya memiliki kesamaan fokus dengan organisasi Islam lainnya pada waktu yang sama, seperti bergerak dalam dunia dakwah, pendidikan dan sosial. Oleh sebab itu bukan suatu hal yang aneh apabila sampai saat ini kegiatan Wanita PUI tidak pernah bergeser dari fokus ketiganya ditambah dengan kegiatan ekonomi.

Sejak kelahirannya pada tahun 1930, menurut Isnaeniah (1998) perjuangan diawali sebelum terjadinya perang kemerdekaan sampai terlibat secara aktif dalam mempertahankan kedaulatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Anggota-anggota PUI termasuk didalamnya anggota Wanita PUI mengikat diri dalam perjuangan bangsa. Aktivitas dapur umum, “palang merah”, bahkan sebagai kurir penghubung, bergabung dengan pasukan-pasukan pejuang seperti, Hizbullah, Sabilillah, markas gerakan organisasi menjadi ciri khas dan utama perjuangan Wanita PUI pada waktu itu, sebagaimana juga perempuan-perempuan Islam Indonesia lainnya yang tergabung dalam organisasi perempuan Islam Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia telah memberikan corak baru pada pergerakan perempuan Indonesia khususnya organisasi perempuan

Islam. Organisasi perempuan Islam dituntut untuk mengembangkan diri sesuai dengan perubahan sosial dan budaya dalam zaman yang senantiasa mengalami kemajuan drastis dalam seluruh kehidupan dan aktivitas manusia. Keikutsertaan Wanita PUI dalam kegiatan-kegiatan sejak awal kemerdekaan, masih menurut Isnaeniah (1998) membawa perubahan dalam pola berfikir. Pergaulan, pertemanan dan seringnya bekerjasama dengan organisasi perempuan Indonesia lainnya dan tidak hanya terbatas pada organisasi perempuan Indonesia yang bercirikan Islam sebagai organisasi keagamaan, setidaknya telah mampu memberikan pengembangan dan peningkatan wawasan berpikir dalam mengelola organisasi kearah berkembang.

Semenjak terbentuknya pada tahun 1952, Wanita PUI berusaha untuk melaksanakan azas keterbukaan dalam pengelolaan organisasi. Pelaksanaan demokrasi dan musyawarah setidaknya tercermin dalam sistem pemilihan langsung dalam menentukan pimpinan yang berlaku dari pusat sampai daerah, dari muktamar sampai konferensi wilayah, cabang dan anak cabang, bahkan sampai ke ranting atau jam’iyyah. Muasyawarah menjadi sendi dasar dalam pengambilan keputusan, adalah menyangkut permasalahan-permasalahan agama. Menurut Isnaeniah (1998) pimpinan Wanita PUI senantiasa berkonsultasi dengan pimpinan dan para tokoh PUI menurut tingkatannya hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa PUI adalah organisasi induk Wanita PUI. Sedangkan dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan Wanita PUI senantiasa berorientasi kepada kebutuhan masyarakat *grassroot* (lapisan bawah/kaum “Mustad’fin”) sesuai dengan itikad awal didirikannya organisasi, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk meringankan beban sesama manusia.

Struktur organisasi Wanita PUI tidak jauh berbeda dengan dengan struktur peme-

rintahan. Pada tingkat pusat kepengurusan Wanita PUI disebut PB (Pengurus Besar), kemudian berturut-turut dibawahnya; PW (Pengurus Wilayah/pengurus daerah tingkat I) setingkat provinsi, PD (Pengurus Daerah tk.II) setingkat kota/kabupaten, pengurus cabang (setingkat kecamatan), PR (Pengurus Ranting) atau PJ (Pengurus Jami'iyah).

Berkembangnya kegiatan organisasi perempuan di Indonesia, salah satunya adalah *Istri Sedar* dan organisasi perempuan yang didirikan oleh aktivis organisasi massa Islam, seperti Aisyiah, Persistri, Muslimat NU dan lainnya, telah menjadi inspirasi bagi perempuan aktivis organisasi Persatuan Ummat Islam (PUI) untuk menghimpun kelompok sendiri dan berciri khas perempuan Islam yang dinamis dalam organisasi terpisah (Otonom). Mukhtar PUI I pada tanggal 5 April 1952 di kota Bandung menurut Wanta (1990), merupakan momentum yang tepat untuk merealisasikan cita-cita kaum perempuan Islam aktivis PUI. Pada saat itu-lah, melalui keputusan Mukhtar, Wanita PUI resmi menjadi sebuah badan otonom yang laik melaksanakan partisipasinya secara lebih bebas dalam mengekspresikan harapan dan seluruh cita-citanya dalam berbagai kegiatan bertujuan untuk membangun kaumnya, perempuan Islam di Indonesia

2. Paska Kemerdekaan dan Partisipasi dalam Pembangunan

Sejak awal perjuangannya, Wanita PUI berusaha mencerdaskan kader dan anggotanya dalam melakukan berbagai upaya, seperti mengadakan workshop kepemimpinan perempuan Islam, pelatihan pemberdayaan perempuan Islam. Selain meningkatkan secara kuantitas, menurut Isnaeniah (1998; 67) peningkatan secara kualitas juga mendapat perhatian yang luar biasa besarnya. Sehingga dapat tercapai peningkatan kemampuan berorganisasi para kader dan anggotanya. Lebih khusus-

nya lagi diberikan kepada para pimpinan, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, terlebih kepada para pimpinan yang berada di puncak tertinggi, yaitu pengurus besar.

Wanita PUI sudah sejak awal bersinergi dengan seluruh organisasi perempuan lainnya. Begitu juga Wanita PUI turut terlibat dalam seluruh program kemajuan bagi perempuan yang diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, seperti menjadi mitra pemerintah di BKKBN, maupun departemen sosial (sekarang kementerian sosial), kementerian peranan Wanita (sekarang kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak). Masalah utama yang selalu menjadi keprihatinan adalah masalah kebodohan dan kemiskinan dikalangan perempuan Islam khususnya dan ummat Islam pada umumnya. Sehingga hampir selama keberadaan Wanita PUI sebagai organisasi perempuan Islam, dari awal kelahirannya, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai saat ini orde Reformasi, banyak program-program yang dibuat untuk menurunkan bahkan berharap mampu menghilangkan kemiskinan dan kebodohan. Sasaran utama garapan program ini, adalah perempuan Islam pedesaan, karena sebagian besar dari mereka adalah simpatisan dan anggota Wanita PUI.

Poin terpenting dari diadakannya program pendidikan, adalah dengan lahirnya kesadaran bahwa pendidikan yang paling baik adalah yang diberikan secara dini. Seperti yang disampaikan Delors (1998; 13-14), anak-anak dan generasi muda adalah kelompok yang akan mengambil alih tugas generasi tua sebagai penerus. Selain itu, pendidikan adalah faktor penting yang menopang kehidupan manusia, seperti kata-kata bijak yang disampaikan oleh seorang penyair: "Anak-anak adalah ayah dari manusia". Oleh sebab itu Wanita PUI telah menggerakkan seluruh pimpinannya

sekaligus dengan pengurus dan para kader dari berbagai tingkatan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan diberi nama TK Wanita PUI. Sebagian besar menurut Dedah Jubaedah, Erni Isnaeniah, dan Yeti Heryati (2004) taman kanak-kanak yang didirikan oleh Wanita PUI telah mencapai standard yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (pada saat itu).

Meskipun prioritas di bidang garapan pendidikan, yaitu menyelenggarakan pendidikan setingkat taman kanak-kanak, akan tetapi khusus di Majalengka didirikan pula pendidikan 6 (enam) tahun sekolah khusus perempuan (puteri dari anggota PUI) dengan nama “Mualimat” Fathimiyah dan di Sukabumi dengan nama Zaenabiyah. Menurut catatan sejarah, madrasah Mualimat ini seperti yang disampaikan oleh Eti Nurhayati (2016; 2) adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh KH. Abdul Halim *founding father* PUI pada 5 April 1961 di Majalengka. Sedangkan tugas pengelolaannya diserahkan kepada organisasi otonom PUI yaitu Wanita PUI. Madrasah Mualimat ini di awal berdirinya sampai kemudian berubah dengan adanya peraturan pemerintah tetap mempertahankan karakteristik dan model pendidikan khas PUI.

3. Corak Organisasi Wanita PUI

1. Di awal kehadirannya hingga tahun 1970an

Pada perjalanan perjuangannya, Wanita PUI memiliki beberapa kekhususan dan kekhasan dibandingkan organisasi perempuan Islam lainnya yang ada di Indonesia. Diawali dengan adanya dua organisasi masyarakat perempuan Islam kedaerahan yaitu Fatimiyah otonom PUI di Majalengka dan Zaenabiyah otonom PUI di Sukabumi. Apabila membaca catatan sejarah perjalanan Wanita PUI, maka urutan perjalanan Wanita PUI memiliki beberapa fase seperti yang disampaikan oleh Titin

Hunaenah Nisrinati ketua PW. Wanita PUI Jawa Barat. *Pertama*, fase sebelum berfusi dengan nama masing-masing Fathimiyah dengan ketua ibu. Manik Anisyah, dan Zaenabiyah dengan ketua ibu, *kedua*, setelah berfusi pada tahun 1952 dengan nama Wanita Persatuan Ummat Islam (Wanita PUI) dengan posisi sebagai badan otonom, *ketiga*, fase ketiga dimulai dari tahun 1994 sampai 2005 posisi Wanita PUI pada saat itu tidak lagi menjadi badan otonom akan tetapi hanya sebagai satu dari delapan majelis yang dimiliki oleh PB. PUI, sekarang PP. PUI. Pada keadaan yang sebenarnya perjalanan selama 69 tahun Wanita PUI telah tampil dalam dinamika pergerakan organisasi perempuan Islam di Indonesia, seperti apa yang dijelaskan dalam paradigma fakta sosial “milik” E. Durkheim dalam Ritzer (2003) bahwa ada kekuatan di luar Wanita PUI yang mengarahkan sehingga Wanita PUI sebagai organisasi perempuan Islam Indonesia belum memiliki kebebasan dalam menentukan kehendaknya sendiri.

Selanjutnya, corak Wanita PUI pada tahun 1970-an ini, menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUI, Wanita PUI merupakan badan otonom dari PUI. Bicara soal Wanita PUI berarti berbicara pula soal organisasi induknya PUI. Dalam referensi yang membahas tentang gerakan organisasi Islam modernis di Indonesia, menurut Deliar Noer (1990), PUI umumnya diletakkan dalam suatu tarikan nafas dengan Muhammadiyah, al-Irsyad, Jami'at Khoir, dan Persis yang digolongkan sebagai kelompok modernis Islam yang berupaya melakukan pemurnian aqidah dan syariah atau *reform* terhadap pemahaman Islam dan berusaha melakukan pembaharuan Islam dengan berdasarkan daan berlandaskan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

Partisipasi perempuan khususnya kader sekaligus anggota organisasi perempuan

Islam Indonesia dalam pembangunan, tidak dapat diragukan lagi. Salah satunya Wanita PUI pada tahun 70-an memiliki situasi sangat strategis dan menguntungkan bagi keberadaan organisasi. Pada saat itu negara dipimpin oleh rezim masih baru, yaitu “Orde Baru”, yang tengah giat mengadakan pembangunan di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya pembangunan sumber daya manusia yang terdidik dan unggul. Keberadaan organisasi perempuan khususnya organisasi perempuan Islam merupakan salah satu wilayah strategis dan sekaligus menjadi partner pemerintah dalam mensukseskan program tersebut.

Organisasi perempuan Islam Indonesia, seperti Aisyiah, Persistri, Muslimat NU, Wanita Tarbiyyah, dan Wanita PUI telah mampu menjalankan semua program pemerintah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan pemberdayaan perempuan Islam dan keluarga.

Wanita PUI dekade 1970-an dinilai telah cukup berhasil dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai organisasi perempuan Islam Indonesia. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang garapan Wanita PUI, seperti :

- a. Dakwah
- b. Pendidikan
- c. Sosial, dan
- d. Ekonomi

Akan tetapi, secara keseluruhan tidak sedikit keberhasilan yang telah diraih oleh organisasi perempuan Islam Indonesia Wanita PUI, pada kenyataannya dipandang hanyalah sebagai gambaran dari partisipasi “semu”, penyebabnya, Wanita PUI senantiasa berada dalam pengerahan pihak lain atau disebut juga *mobilized participation* dalam hal ini adalah PUI organisasi induk Wanita PUI tempat bernaung selama ini. Selain itu, menurut Anita Rahman (1996) peranan organisasi perempuan

Islam Indonesia dalam pembangunan, sesungguhnya tergantung pada sejauh mana masing-masing organisasi tersebut mampu mengantisipasi berbagai bidang garapan dalam program-programnya. Bobot masing-masing cabang organisasi perempuan Islam tersebut berbeda sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

2. Corak Wanita PUI tahun 1990-an

Mengamati sekaligus mendalami gerak laju sebuah gerakan organisasi khususnya organisasi perempuan Islam di Indonesia bisa jadi tidak akan mungkin mampu memahaminya secara sempurna. Terlebih organisasi tersebut telah berusia lebih dari 50 tahun seperti yang dialami oleh organisasi perempuan Islam Indonesia Wanita PUI. Dalam membahas corak dan keberadaan Wanita PUI tahun 1990-an, pada dasarnya lebih ditekankan pada tahun 1994 dan sesudahnya, hal ini disebabkan tahun 1994 merupakan tahun berubahnya posisi Wanita PUI yang semula badan otonom yang ditetapkan melalui muktamar IX PUI kemudian berubah dan “hanya” menjadi satu dari delapan majelis yang ada dalam kepengurusan PB. PUI. Akan tetapi, diharapkan adanya satu kesatuan utuh sebagai sebuah kisah perjalanan sejarah panjang sebuah gerakan organisasi perempuan Islam di Indonesia. Keberadaana Wanita PUI sebelum tahun 1994, menurut hasil wawancara dengan mantan ketua PB. Wanita PUI ibu. Iva Ikhlasiah, bisa saja dikatakan sebagai penyebab berubahnya posisi Wanita PUI di pentas ruang pribadinya.

Dalam muktamar ke VIII pada tahun 1989 terpilih sebagai pengurus puncak PB. Wanita PUI, sebagai ketua adalah ibu. Kustinah Idad, wakil ketua ibu. Iva Ikhlasiah, dan sekretaris umum ibu. Dra. Dadah Badruddin. Ketiga pengurus puncak Wanita PUI ini memiliki garis keturunan yang berasal dari ke-

luarga besar KH. Abdul Halim *founding father* PUI. Ibu. Iva Ikhlasih dan ibu. Dadah Badruddin keduanya adalah cucu KH. Abdul Halim, sedangkan ibu. Kustinah Idad adalah adik dari menantu KH. Abdul Halim, sekaligus pernah menjadi ketua Wanita PUI pertama setelah terjadinya fusi, yaitu ibu. Kusiyah Abdul Halim.

Ketiga pengurus puncak Wanita PUI tersebut selain sibuk di organisasi, ditambah kesibukan di dalam karier masing-masing yang juga menuntut perhatian. Seperti ibu. Kustiyah Idad menjadi kepala sekolah salah satu Aliyah negeri di Kota Bandung (pada waktu itu PGA negeri). Ibu Iva Ikhlasih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat TK. II kabupaten Majalengka mewakili PPP, sedangkan ibu. Dra. Dadah Badruddin berkarier di departemen agama pusat di Jakarta. Dengan kesibukan ketiga pengurus pucuk pimpinan PB. Wanita PUI di kota yang berbeda bisa saja menjadi salah satu kendala kurang terjalinnya kekompakan dan kekokohan sebuah *“team work”* dapat terwujud.

Indikator dari tidak adanya kerjasama pada ketiga pucuk pimpinan Wanita PUI tersebut, dapat dilihat dalam program kerja yang mereka buat kemudian disusun tidak ada satu-pun yang baru, yang ada hanya sekedar melanjutkan tradisi yang telah dikerjakan oleh pengurus pusat sebelumnya. Adanya ibu. Iva Ikhlasih yang telah beberapa periode tetap menjadi pengurus pusat, sedikitnya mampu memberikan dampak positif setidaknya membuat Wanita PUI tidak terlalu tenggelam ke dasar. Daftar tertinggalnya Wanita PUI dari organisasi perempuan Islam lainnya yang ada di Indonesia apabila lebih dicermati akan terlihat semakin panjang dan mencolok. Selain tidak adanya orientasi yang jelas dalam visi organisasinya (bisa saja adalah karena ciri khas Wanita PUI sebagaimana organisasi induknya PUI yang *berwajah ganda*, istilah

yang disematkan kepada PUI adalah paham teologis yang tidak berpihak kepada madzhab fiqh apapun dan manapun penyebab kehilangan orientasi dalam mempertahankan identitas organisasi).

Berlakunya aturan pemerintah yang baru sejak pertengahan tahun 1980an. Isi dari peraturan tersebut adalah menyeragamkan semua lembaga pendidikan milik perseorangan ataupun organisasi (seperti diketahui bahwa PUI memiliki lembaga pendidikan khusus putri dengan lamanya pendidikan 6 (enam) tahun dengan nama Muallimmat, namun semenjak adanya peraturan pemerintah diganti dengan level pendidikan umum keagamaan yaitu tsanawiyah dan aliyah meskipun tetap memakai nama PUI). Dengan berubahnya model lembaga pendidikan tersebut, Wanita PUI telah kehilangan wadah untuk memupuk sekaligus membina kader unggulan yang telah menjadi tradisi ke setiap generasi.

Salah satu penyebab adanya anggapannya tersebut, adalah berubahnya model kurikulum yang dibuat sekaligus diberlakukan oleh pemerintah di semua lembaga pendidikan dalam tingkatan yang sama, sehingga nilai kekhasan dan sakralitas PUI menjadi memudar. Selain itu, sistem pengkaderan yang ada di organisasi Islam PUI setidaknya turut pula menambah hilangnya *“elan”* dan juga *“ghiroh”* (semangat) dalam menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan organisasi yang selalu diucapkan oleh kader-kader PUI di seluruh *“lini”* kegiatan yang berhubungan dengan organisasi, yaitu doktrin *Intisab*, seperti yang disampaikan oleh Fikri Dikriansyah (2018; 34-36) adalah sebagai sarana pengkaderan organisasi Islam Indonesia PUI. Lebih jelasnya, *Intisab* adalah mempersatukan, menghubungkan, mempersenyawakan, mengerabatkan sekaligus mengikat dalam kukuhnya tali persaudaraan. Secara sederhana kata *intisab* adalah ikrar atau janji yang mengandung

perumusan mengenai; *mabda* (titik tolak, dasar, landasan), *manhaj* (metode amaliah), *iqrar mujahadah* (kebulatan tekad, kesungguhan perjuangan dan pengorbanan), serta tawaqal berserah diri kepada Allah, baik dari jamiyyah (perhimpunan) ataupun jamaah (pimpinan, pengurus, anggota, dan warga).

Model pengkaderan di tubuh PUI khususnya dilingkungan keluarga para *founding fathers* tampaknya tidak sebergairah seperti kaderisasi yang diadakan dikalangan masyarakat di daerah lahirnya organisasi, yaitu Majalengka dan Sukabumi. 2 (dua) keluarga founding fathers, keluarga KH. Abdul Halim dan keluarga KH. Sanusi, utamanya para generasi ke tiga dan ke empat serta generasi selanjutnya, banyak yang tidak menyenjam pendidikan di lembaga pendidikan milik PUI, seperti “Santri Ashromo”, Darul Ulum PUI baik di Majalengka ataupun di Sukabumi, Muallimat puteri yang berubah menjadi tsanawiyah dan aliyah. Lembaga pendidikan ini lebih didominasi oleh masyarakat umum yang menjadi simpatisan PUI. Generasi pelanjut kedua pendiri ini bahkan banyak yang sama sekali tidak aktif baik sebagai pengurus di organisasi PUI dan para badan otonomnya, ataupun pengajar di semua tingkatan lembaga pendidikan milik PUI.

Rendahnya rasa keterikatan dan lemahnya empati silaturahmi generasi pelanjut dari ke 2 (dua) keluarga pendiri tersebut sangat terlihat jelas dari kurang memahaminya hakekat serta landasan sejarah perjuangan didirikannya organisasi PUI. Bahkan rasa memiliki untuk mempertahankan organisasi dengan ikhtiar untuk melacak jejak tradisi PUI agar PUI memiliki sejarah dengan seluruh benang merah yang menyertainya belum pernah dilakukan, adapun yang melakukannya adalah kalangan akademisi yang secara emosi kedaerah berasal dari 2

daerah tempat lahirnya PUI, yaitu Majalengka dan Sukabumi.

Keberadaan yang sesungguhnya yang dialami oleh Wanita PUI sangatlah disayangkan oleh para aktivis perempuan Islam. Padasarnya dan dalam kenyataannya, organisai perempuan Islam “ini” dioharapkan mampu mengisi kekosongan dari belum lengkapnya nuansa yang mewarnai gerakan organisasi perempuan Islam di Indonesia. Suasana pada saat itu mulai memasuki paruh pertama millennium ketiga yaitu abad ke 21.

Kesepakatan berubahnya posisi Wanita PUI dari badan otonom menjadi Majelis Wanita, adalah, menurut para peserta Muktamar IX PUI disebabkan, Wanita PUI merasa kekurangan sumber daya manusia untuk menggerakannya. Apabila demikian, tepatlah apa yang disampaikan oleh Peter L. Berger dalam Ritzer (2003) tentang terori internalisasi lebih tepatnya mengenai sosialisasi yang kemudian diinternalisasi wajib diberikan oleh para orang tua kepada anak-anaknya, guru (pendidik) kepada para muridnya, dan da’iyyah serta para mubaligh perempuan (mubalighat) kepada para jamaahnya, bahwa betapa pentingnya mengenal seluruh jati diri kehidupan manusia bahwa “ia” tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri, karena sosialisasi menurut Peter L. Berger, adalah proses belajar individu dari lahir sampai mati untuk menjadi member of society atau anggota masyarakat, nilai-nilai lingkungan keluarga adalah paling penting diberikan kepada manusia sejak masa awal anak mengenal kata yang diajarkan oleh orang tuanya.

Kegagalan PUI mengsosialisasikan kemudian dilanjutkan kepada proses menginternalisasikan nilai-nilai PU, bahwa betapa penting dan berharganya keberadaan organisasi PUI bukan hanya untuk lingkungan keluarga besar para pendirinya saja, akan tetapi kehadiran PUI adalah urat nadi bagi keber-

langsungan kehidupan masyarakat minimal di dua daerah tempat lahir PUI, Majalengka dan Sukabumi. Karena keberadaan PUI adalah keberlangsungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan, karena PUI dengan lembaga pendidikannya adalah nafas bagi masyarakat khususnya ummat Islam, karena PUI adalah urat nadi ekonomi bagi masyarakatnya. Betapa pentingnya kehadiran PUI terlebih Wanita PUI bagi kaum perempuan Islam di Indonesia.

Kegagalan Wanita PUI membina, anggota, kader, dan para simpatisannya untuk tetap berjuang bersama adalah kegagalan seluruh elemen PUI. Suatu keanehan dalam pandangan aktivis perempuan lainnya apabila Wanita PUI mengalami “stagnasi” dalam pengkaderan, karena menurut mereka tahun 1990-an adalah tahun yang penuh dengan kedinamisan bagi seluruh perempuan aktivis perempuan Islam penggiat organisasi Islam di pentas Indonesia, karena menurut, John Naishbit dan Eburdent dalam bukunya “Megatrend 2000” menjelaskan bahwa abad 21 adalah abadnya kaum perempuan di dunia. Kemajuan akan keberhasilan dalam program-programnya sedang dinikmati oleh organisasi perempuan Islam di Indonesia, keadaan sebaliknya dialami oleh penggiat organisasi Wanita PUI, padahal begitu banyak panduan dan bimbingan yang diberikan pemerintah melalui kementerian peranan Wanita (pada saat itu).

Menurut Anita Rahman (1996), salah satu rumusan tentang peranan Wanita dalam pembangunan telah digulirkan berdasarkan keputusan Presiden No. 25 tahun 1983, dirumuskan, direncanakan serta dikoordinasikan oleh kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dalam “Analisa Situasi Wanita Indonesia”, maka pengintegrasian Wanita dalam pembangunan meliputi bidang-bidang:

1. Bidang ekonomi, meliputi bidang-bidang ketenagakerjaan, pertanian, industri, jasa (perdagangan, transportasi, dan komunikasi, keuangan), sumber alam dan lingkungan hidup, koperasi, dan transmigrasi.
2. Bidang Sosial dan Budaya, meliputi bidang-bidang pendidikan, kesehatan, gizi, dan keluarga berencana (KB)
3. Bidang-bidang yang meliputi, politik, aparatur pemerintah, hukum, penerangan dan media massa, serta hubungan luar negeri.

Pada kenyataannya, hampir semua aktivis, kader dan penggiat gerakan organisasi perempuan di Indonesia, belum mampu untuk melaksanakan semua bidang-bidang garapan bagi kemajuan dan pemberdayaan perempuan yang dikeluarkan oleh menteri Negara urusan peranan Wanita. Bagi Wanita PUI, “hanya” akan melaksanakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dirasakan sangat mendesak serta bermanfaat secara langsung yang dirasakan bagi para anggota dan simpatisan serta sasaran garapan Wanita PUI.

Keanggotaan yang dimiliki oleh organisasi perempuan Islam khususnya Wanita PUI, hampir ada di seluruh wilayah republic Indonesia. Wanita PUI memiliki organisasi lengkap dari pusat sampai ke daerah kabupaten/kota, bahkan sampai ke tingkat desa/kelurahan atau disebut kepengurusan tingkat ranting. Dengan basis kekuatan kader Wanita PUI ada di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka dan sekitarnya, serta Kabupaten/Kota Sukabumi dan sekitarnya. Kenyataan ini, tentang semaraknya kader dan simpatisan Wanita PUI yang hampir tersebar di seluruh Indonesia sesungguhnya, merupakan asset yang luar biasa bagi Wanita PUI, sangat *anti tesis* apabila Wanita PUI mengalami kegagalan dalam membangun kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

3. Corak Organisasi Wanita PUI tahun 2000an PW. Wanita PUI Jawa Barat Periode 2016-2021

Setelah berakhirnya massa corak Wanita PUI tahun 90an, di saat itu terjadi perubahan posisi dari badan otonom menjadi majelis Wanita PUI di dalam kepengurusan PB. PUI periode 1990 tepatnya tahun 1994, dengan alasan kurang tersedianya sumber daya manusia, khususnya perempuan kader yang berkualitas di kalangan Wanita PUI.

Kenyataan yang seperti itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama, karena Wanita PUI akan semakin tertinggal jauh oleh rekan-rekannya sesama penggiat organisasi perempuan Islam di Indonesia. Kesadaran mulai muncul dari kalangan muda kader Wanita PUI, mereka berinisiatif untuk membetuk kembali badan otonom Wanita PUI pada Mukhtamar yang diadakan tahun 2005 mereka mengatakan siap dan bertanggung jawab untuk mengembalikan Wanita PUI kepada khittah yang sesungguhnya sebagaimana semangat awal terjadinya sejarah Fusi tahun 1952 di Bogor, antara Fathimiyah di Majalengka dan Zaenabiyah di Sukabumi.

Sehingga sejak tahun 2005 Wanita PUI kembali menjadi badan otonom. Semenjak kembali menjadi badan otonom Wanita PUI mendapat limpahan manfaat luar biasa kebebasan untuk berekspresi dalam membuat program sekaligus bidang garapannya ditopang oleh sumberdaya manusia yang cukup berlimpah, munculnya kader-kader muda berkualitas di dekade 2000an menandakan Wanita PUI mulai memahami arti perjuangan di pentas organisasi gerakan organisasi perempuan Islam Indonesia yang sesungguhnya.

Struktur organisasi Wanita PUI tidak bedanya dengan struktur pemerintahan di Indonesia yaitu dari pusat ke daerah, mulai dari PP (Pucuk Pimpinan), PW (Pimpinan Wilayah), PC (Pimpinan Cabang), PAC

(Pimpinan Anak Cabang), dan struktur terendah, yaitu PR (Pimpinan Ranting) banyak tersebar di pedesaan di daerah lumbung kader-kader PUI di daerah Majalengka dan Sukabumi.

Organisasi yang oleh Weber dalam Etzioni (1985; 73) disebut sebagai birokrasi, memberikan definisi tentang organisasi. Selain itu Weber sebagai salah seorang pendiri aliran strukturalis menyampaikan pendapatnya masih dalam Etzioni (1985), di dalam satu struktur organisasi atau birokrasi dipastikan adanya suatu pendistribusian kekuasaan melalui berbagai posisi di dalam organisasi tersebut. Selain itu, menurut Parsons (1960), organisasi adalah unit sosial (atau pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pada umumnya organisasi ditandai oleh banyak hal, salah satunya adalah adanya pembagian dalam pekerjaan atau *division of labour* sebagai seperti yang dikemukakan oleh Durkheim dalam Ritzer (2003).

Keberadaan Wanita PUI selain dari organisasi yang menghimpun perempuan Islam yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama, adalah organisasi perempuan Islam yang berorientasi kepada dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan sedikit dalam bisang garapan ekonomi. Sampai tahun 1994, saat diadakannya mukhtamar ke IX Wanita PUI, organisasi perempuan Islam ini telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, yaitu :

1. Ibu Kusiyah Azis Salim
2. Ibu Muhafillah
3. Ibu Halimah Halim
4. Ibu Iva Ikhlasiah
5. Ibu Kustinah Idad
6. Ibu Raudlah

Saat ini, PP Wanita PUI dipimpin oleh Ibu Dra. Iroh Siti Zahroh, M.Si. Sedangkan

PW. Wanita PUI Jawa Barat dipimpin oleh Ibu Hj. Dra. Titin Hunaenah Nisrinati, MM.

Susunan dewan pengurus wilayah Wanita PUI Jawa Barat periode 2016-2021, disesuaikan dengan jumlah bidang garapan tahun amaliyah 2016-2021, yaitu terdiri dari 6 (enam) bidang garapan ditambah dengan koordinator daerah, dewan pertimbangan, dan dewan pakar. Walaupun susunan pengurus PW. Wanita PUI Jawa Barat diisi oleh perempuan dengan tingkat pendidikan rata-rata S1 dan beberapa orang S2. Akan tetapi Wanita PUI terlihat belum mampu bergeser dari apa yang disebut dengan *dimensi subjektif*, yang salah satu pembentuknya adalah faktor keturunan. Dengan terpilihnya ibu Iroh Siti Zahroh sebagai ketua PP. Wanita PUI periode 2016-2021 pendapat tersebut terbukti kebenarannya karena ibu Iroh adalah cucu dari *founding fathers* PUI berasal dari “klan” KH. Abdul Halim.

Belum mampunya Wanita PUI bergeser dari tradisi awal terbentuknya organisasi masih kental dirasakan, meskipun saat ini Wanita PUI sudah mulai mendapat perhatian lebih dari masyarakat perempuan di luar 2 (dua) kota basis kekuatan PUI, yaitu Majalengka dan Sukabumi.

Meskipun secara kuantitas jumlah sumber daya Wanita PUI sudah jauh melampaui pada saat Wanita berubah posisi menjadi majelis Wanita di PB. PUI pada tahun 1994, akan tetapi bukan berarti program dan bidang garapan yang dibuat serta disusun oleh kader-kader yang termasuk masih muda dan memiliki gaya luarbiasa kemudian berubah ke arah yang lebih progresif, dalam kenyataannya program tersebut sama sekali tidak terbukti mengalami perubahan, hanya kalimat dan kosa kata yang tertulis lebih terlihat mengikuti perubahan dalam kamus bahasa yang sedang berlaku saat ini.

Dapat dilihat dari contoh susunan kata yang dibuat oleh kepengurusan PW. PUI Jawa Barat periode 2016 sebagai berikut; kata yang digunakan sekarang adalah operasional program, masa lalu pelaksanaan program. Contoh berikutnya program yang ada di bidang pendidikan banyak sekali menggunakan kata-kata baru akan tetapi tidak ada satupun, saat ini menggunakan kata mengimplementasikan pada masa lalu menggunakan kata menerapkan.

Operasional program yang dibuat oleh PW. Wanita PUI periode 2016-2021 telah menambah beberapa bidang garapannya, yaitu;

Selain dari bidang garapan utama, yaitu bidang pendidikan ditambah dengan kata dan peningkatan SDM, bidang dakwah ditambah dengan, dan publikasi, bidang pemberdayaan dan ekonomi, bidang garapan yang benar-benar baru tentunya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang menuju kearah globalisasi sempurna tanpa batas. Kemudian bidang yang benar-benar baru juga, adalah bidang bantuan hukum dan komunikasi. Selanjutnya bidang yang baru juga, yaitu pengembangan wilayah dan hubungan antar lembaga.

Sesuatu yang paling menggembirakan adalah adanya prioritas bidang atau pilot project, yaitu program unggulan Wanita PUI, adalah penguatan ketahanan keluarga dan lembaga pendidikan PUI. Unggulan yang secara terintegrasi dilaksanakan melalui 8 (delapan) Ishlah amaliyah, yaitu;

1. Perbaikan Aqidah
2. Perbaikan Ibadah
3. Perbaikan Pendidikan
4. Perbaikan Keluarga
5. Perbaikan adat istiadat
6. Perbaikan Ekonomi
7. Perbaikan Ummat/masyarakat, dan
8. Perbaikan Sosial Kemasyarakatan

(sumber dari buku Program Kerja Pimpinan Wilayah Wanita PUI Jawa Barat Tahun Amaliyah 2016-2021). Dalam pelaksanaan ke delapan *ishlah* tersebut telah diintegrasikan dengan priritas hak-hak perempuan, yaitu; Hak mendapat pendidikan, hak mendapatkan kesehatan yang layak, dan hak ekonomi yang berkeadilan.

Walaupun ditulis secara jelas bahwa 8 (delapan) *ishlah amaliyah* adalah bidang pilot project, akan tetapi dalam kenyataannya hanya satu yang mengalami perubahan yaitu perbaikan kehidupan sosial kemasyarakatan, selain itu masih merupakan bidang garapan yang berasal dari masa lalu.

Kelemahan Wanita PUI dalam mengemas program yang tepat sasaran dalam bidang garapannya, disebabkan ada beberapa kendala, seperti yang disampaikan oleh Nan Rahminawati, N. Hendarsyah, dan Muthia Umar (2006; 143), kendala yang dirasakan pimpinan organisasi perempuan Islam di Jawa Barat dalam kegiatan perencanaan program adalah masalah minimnya, data, informasi, waktu, dan sulitnya menyamakan persepsi dari masing-masing pengurus yang terlibat dalam penyusunan program dalam setiap bidang garapannya.

Akan tetapi, dari semua bukti karya partisipasi PW. Wanita PUI Jawa Barat periode 2016-2021 sebagai bagian dari keprofilannya yang sudah digambarkan. Harapan terbesar bagi Wanita PUI khususnya PW. Wanita PUI Jawa Barat, adalah pertama, diharapkan Wanita PUI menjadi kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial, salah satunya melalui partisipasi di wilayah publik secara mandiri (*autonomous participation*) dan positif. Kedua, diharapkan Wanita PUI menjadi penawar yang mengobati luka-luka akibat perubahan-perubahan yang tidak diinginkan. Dari kesemuanya itu, diharapkan kekuatan spiritual perempuan-perempuan Islam akan membawa

perubahan-perubahan penting dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan.

D. SIMPULAN

Pada keadaan sebenarnya, apabila diamati melalui berbagai dimensi dalam kerangka sebuah organisasi perempuan Islam di Indonesia yang merupakan bagian dari organisasi masa yang dikelola oleh kaum laki-laki, tampaknya masih dalam keadaan mencari bentuk, posisi, dan peran, yang akan dimainkan di masyarakat. Profil utama yang dikedepankan oleh PW. Wanita PUI Jawa Barat tahun 2000-an, dan apabila dapat diambil sebuah kesan tersendiri bahwa organisasi perempuan Islam Indonesia Wanita PUI Jawa Barat yang notabene adalah organisasi perempuan otonom dari salah satu organisasi massa Islam yang memiliki jumlah “lumayan banyak”, kenyataannya masih ditempatkan dalam posisi sebagai “warga kelas dua” dalam komunitas yang dipeluknya atau bisa juga dikatakan dengan istilah organisasi perempuan otonom yang masih “dikendalikan” oleh kaum laki-laki.

Tidak mustahil dalam proses menuju kemandiriannya PW. Wanita PUI Jawa Barat, setidaknya harus mampu mengkaji ulang apa yang telah dikerjakannya selama ini. Meskipun semenjak kelahirannya sampai dengan saat ini Wanita PUI Jawa Barat telah mampu merekrut masyarakat menjadi anggota dan simpatisannya kenyataannya, ternyata jumlah anggota dan simpatisannya apabila dibandingkan dengan organisasi perempuan Islam lainnya yang ada di Jawa Barat bisa jadi banyak secara kuantitas. Namun, jumlah tersebut disebabkan adanya apa yang disebut dengan *dimensi subjektif*, yang salah satunya terbentuk oleh faktor keturunan. Selain jumlah yang banyak, disebabkan faktor keturunan, mayoritas anggota Wanita PUI khususnya PW. Wanita PUI Jawa Barat saat ini berpendi-

dikan setingkat SMA dan sedikit S1 serta lebih sedikit lagi S2 dan S3.

Selain itu, kenyataan yang dihadapi oleh PW. Wanita PUI Jawa Barat periode 2016-2021, dalam kenyataannya belum terlihat mengerahkan semua kemampuannya dalam memasyarakatkan semua program yang ada dalam bidang garapan. Terlebih dengan program pemberdayaan dan hak-hak perempuan, serta 8 (delapan) pilot project sebagai bidang garapan unggulan yang implementasinya belum secara jelas terlihat akan presentasi keberhasilan dan kegagalan.

4 (empat) fase atau periodisasi jejak sejarah Wanita PUI, dengan memiliki 3 (tiga) corak perbedaan para kader Wanita PUI yang berbeda disetiap fase dan coraknya. Sebagai organisasi yang merupakan bagian dari keluarga PUI dan saat memiliki posisi sebagai badan otonom, dapat dipahami bahwa partisipasi Wanita PUI khususnya PW. Wanita PUI Jawa Barat periode 2016-2021 telah mulai diterima di masyarakat perempuan Jawa Barat. Hal ini dapat dijadikan indikator, bahwa Wanita PUI mulai sejajar dan setara dengan organisasi perempuan Islam lainnya di Indonesia yang telah lebih dahulu memainkan perannya secara maksimal dan Optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dikriansyah, Fikri, 2018. *"Doktrin Intisab PUI Sebagai Sarana Penguatan Militansi Kader. Studi Sejarah Organisasi Islam di Jawa Barat"*. Skripsi. Prodi Sejarah Peradaban Islam. Fakultas Adab dan Humaniora. UIN Syarif Hidayatullah
- Hafidz, Wardah, 1996. *"Gerakan Perempuan dan Transformasi Bangsa"*. Jakarta, Koran harian Kompas. Edisi 21 April 1996.
- Hafidz, Wardah, 1993. "Arah Pengembangan Organisasi Wanita Islam Indonesia. Dalam Marcoes-Natsir, M Lies dan Johan Hendrik Meuluman (ed). *"Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual"*. Jakarta. INIS; hal. 135-137
- Isnaeniah, Erni, 1996. *"Perkembangan Gerakan Organisasi Perempuan Islam Indonesia. Studi Kasus; PP.Persistri1990-1996"*. (Penelitian). Bandung. IAIN Sunan Gunung Djati. LP2M
- Koentowijoyo, 1993. "Arah Pengembangan Organisasi Wanita Islam Indonesia; Kemungkinan kemungkinannya", Dalam, Marcoes-Natsir, M. Lies dan Johan Hendrik Meuleman (ed). *"Wanita Islam Indonesia; dalam kajian Tekstual dan Kontekstual"*. Jakarta. INIS. Hal. 129-134
- Rahman, Anita, 2000. "Reinterpretasi Feminis Muslim". Dalam *"Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah"*. Jakarta. Program Studi Kajian Wanita, PPS Universitas Indonesia
- Lubis, Herlina Nina, 2011. *"Metodologi Penelitian Sejarah"*. Edisi revisi. Bandung. Satya Historika.
- Meleong, J, Lexy, 2011. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Edisi revisi, Bandung, Remaja Rosda Karya. Cet. 29
- Nurhayati, Eti, 2016. *"Model Pendidikan Untuk Perempuan. Studi Kasus; Madrasah Muallimat PUI Majalengka Jawa Barat"*. Yogyakarta. LPPMP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal Cakrawala Pendidikan, Februari 2016. Th. XXXV, No. 3

- Noer, Deliar, 1986. *“Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942”*. Jakarta. LP3ES
- Rahminawati, Nan. Hendarsyah N. umar, Mutia, 2006. *“Kemampuan Manajerial Pengurus Organisasi dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Organisasi Islam Perempuan di Jawa Barat”*. Bandung. Jurnal Mimbar Volume XXII, No. 2 April-Juni 2006. Hal. 143-163
- Ritzer, George – Goodman J. Douglas, 2003. *“Teori Sosiologi Modern”*. Jakarta. Kencana. Media
- Rahayu, Ruth Indiah, 1996. *“Politik Gender Orde Baru; Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980an”*. Jakarta. LP3ES. Prisma No. 5
- Wanta, S, 1987. *“35 Tahun Persatuan Ummat Islam (PUI)”*. Dalam *“Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan”*. Majalengka. Majelis Penerangan dan Dakwah PB. PUI